



**MERDEKA
BELAJAR**

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2024



**MERDEKA
BELAJAR**

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PENGANTAR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sebelas Maret (PPID UNS) memiliki tugas untuk melakukan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, memberikan akses layanan bagi publik untuk menerima berbagai layanan informasi, serta menyediakan kebutuhan informasi yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh publik selama tahun 2024. PPID UNS berupaya meningkatkan kinerja melalui peran sumber daya manusia yang bersedia dan mau mengembangkan jaringan relasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

Laporan berikut memaparkan seluruh agenda, kegiatan, dan produk yang dihasilkan selama tahun 2024. Laporan ini disajikan dengan menggunakan narasi, dokumentasi, tabel, dan infografis yang mudah untuk dipahami.

Diharapkan laporan layanan informasi publik ini memberi manfaat bagi perkembangan Universitas Sebelas Maret serta mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Berbagai bentuk saran dan kritik sangat kami perlukan sebagai bahan koreksi kinerja di waktu yang akan datang. Terima kasih atas upaya dan dedikasi yang telah dilakukan oleh semua pihak untuk membantu proses pembenahan dan kemajuan peran dan fungsi PPID UNS.

PPID UNS



**MERDEKA
BELAJAR**

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	0
DAFTAR ISI.....	1
A. SEJARAH SINGKAT PPID UNS.....	1
B. GAMBARAN UMUM PPID UNS.....	2
1. Sarana dan Prasarana.....	2
a. Kantor PPID UNS.....	2
b. Desk Layanan PPID UNS.....	2
c. Sofa Antrian.....	3
d. Komputer, Printer, dan Internet.....	3
2. Sumber Daya Manusia.....	4
3. Anggaran.....	4
C. RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.....	5
D. LAPORAN KEPUASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	5
E. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	7
F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK UNS 2025... 8	8



A. SEJARAH SINGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNS

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Universitas Sebelas Maret (UNS) menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 452/UN27/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 913/UN27/HK/2022 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sebelas Maret dengan menerapkan tiga prinsip, yaitu cepat, akurat, dan transparan.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan layanan informasi publik, UNS menjalankan serangkaian kegiatan, yaitu menghimpun dan menyampaikan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Sebelas Maret; melaksanakan uji informasi publik untuk masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan; serta menyediakan dan memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka.

Penyediaan informasi publik seiring dengan berkembangnya situasi dan kondisi, PPID UNS menyediakan layanan berbasis daring untuk mempermudah akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Layanan informasi berbasis daring ini dapat diakses melalui laman resmi dan media sosial milik UNS. Adapun untuk informasi data yang tidak dipublikasikan/diunggah melalui laman, masyarakat dapat mengirimkan permohonan informasi publik dengan melakukan prosedur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

B. GAMBARAN UMUM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN PUBLIKASI (PPID) UNS

1. Sarana dan Prasarana

a. Kantor PPID UNS

Layanan rutin PPID UNS salah satu bagian dari Subdirektorat Humas dan Media, Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (DTIK) UNS



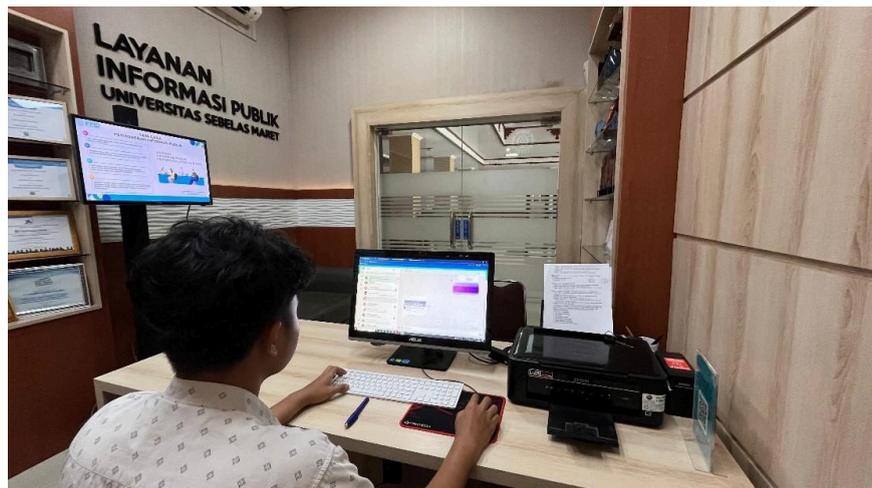
b. Desk Layanan PPID UNS



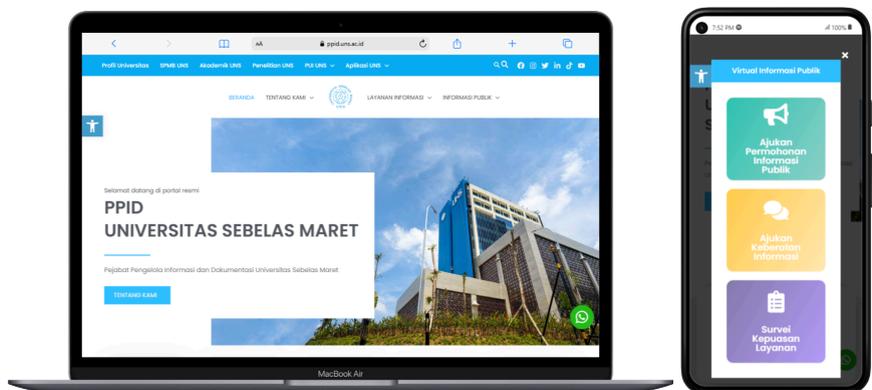
c. Sofa Antrian



d. Komputer, Printer, dan Internet

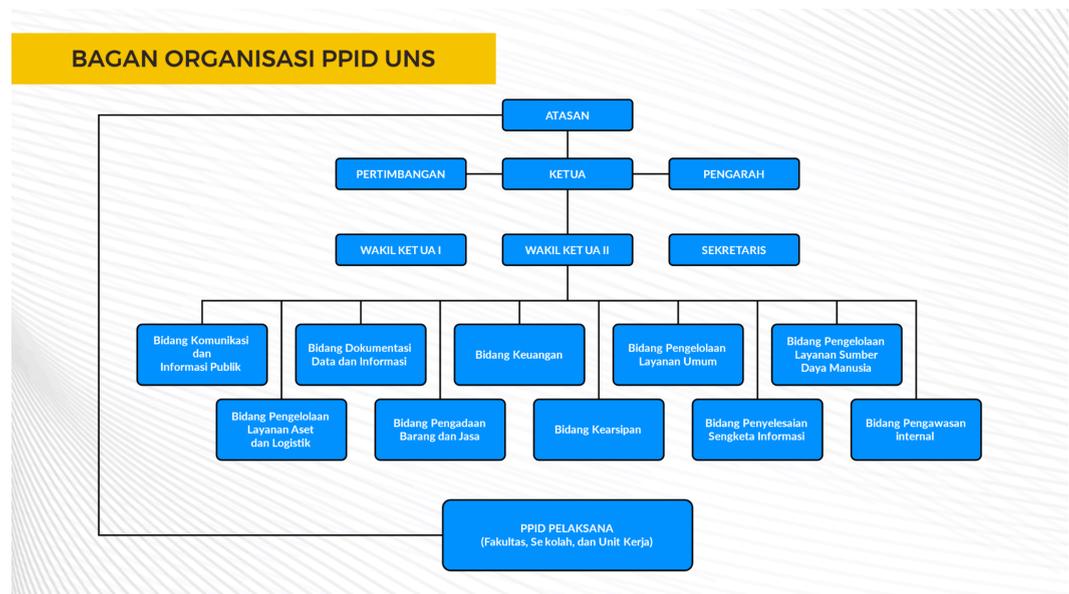


e. Laman PPID



2. Sumber Daya Manusia

Melalui Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2020, UNS secara resmi telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) oleh Presiden Republik Indonesia. Adanya pergantian status tersebut berdampak pada perubahan struktur organisasi di UNS. PPID UNS melakukan penyesuaian dengan menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 452/UN27/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 913/UN27/HK/2022 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sebelas Maret.



3. Anggaran

Dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Universitas Sebelas Maret, PPID UNS menggunakan anggaran operasional yang masih tergabung dengan DTIK UNS. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan PPID diantaranya melakukan pengembangan sarana dan prasarana, penyusunan jenis-jenis informasi, pengembangan media informasi publik melalui laman ppid.uns.ac.id serta pembekalan materi kepada PPID Pelaksana UNS.

C. RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 (Bulan Januari – Desember 2024)

No.	Bulan Register Pemohon Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (Hari)	Permohonan Informasi Publik yang Dibutuhkan	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Alasan Penolakan
						KI	PTUN	MA	
1	Januari	2	3	2	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	4	4	4	0	0	0	0	0
4	April	1	2	1	0	0	0	0	0
5	Mei	3	5	3	0	0	0	0	0
6	Juni	3	3	3	0	0	0	0	0
7	Juli	3	4	3	0	0	0	0	0
8	Agustus	8	5	8	0	0	0	0	0
9	September	9	5	9	0	0	0	0	0
10	Oktober	2	3	2	0	0	0	0	0
11	November	2	3	2	0	0	0	0	0
12	Desember	1	2	1	0	0	0	0	0

D. LAPORAN KEPUASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai upaya peningkatan kualitas layanan PPID UNS, dilakukan survei kepuasan publik yang dilakukan setiap akhir tahun. Pada tahun 2024, survei kepuasan publik terhadap pelayanan pemberian informasi di UNS dengan jumlah responden 32 orang dari masyarakat umum pengguna informasi publik. Adapun aspek yang dinilai sebagai indikator kepuasan pelayanan adalah:

1. Kemudahan Pelayanan
2. Kecepatan Pelayanan
3. Akurasi Pelayanan
4. Biaya Pelayanan



**MERDEKA
BELAJAR**

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Hasil Survei Kepuasan Layanan

No. Responden	Kemudahan Pelayanan	Kecepatan Pelayanan	Akurasi Pelayanan	Biaya Pelayanan
1	4	4	4	5
2	4	5	5	5
3	5	4	5	5
4	5	4	5	4
5	4	5	5	5
6	5	5	4	5
7	4	5	5	4
8	5	5	4	5
9	5	5	4	4
10	1	3	2	5
11	4	4	3	3
12	5	5	4	5
13	3	3	4	3
14	5	4	5	5
15	5	4	4	5
16	3	5	5	4
17	4	4	3	5
18	3	3	3	4
19	4	5	4	4
20	4	5	5	4
21	3	4	4	4
22	5	4	5	5
23	5	5	5	5
24	5	5	5	5
25	4	4	4	4
26	4	4	4	4
27	5	4	5	4
28	5	4	4	4
29	5	5	5	5
30	5	5	5	5
31	5	5	5	5
32	4	4	4	4
Rata-rata per-unsur	4.28	4.38	4.31	4.47

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai indeks kepuasan layanan publik adalah 4,36 dengan nilai indeks kepuasan konsumen sebesar 87,19. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai indeks kepuasan konsumen adalah sangat baik.

Tingkat Kepuasan Layanan

No	Hal yang Dinilai	Kepuasan
1	Kemudahan Pelayanan	4,28
2	Kecepatan Pelayanan	4,38
3	Akurasi Pelayanan	4,31
4	Biaya Pelayanan	4,47
Indeks Unit Pelayanan		4,36
Indeks Kepuasan Konsumen		87,19

Rank Tingkat Kepuasan Layanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKK	Nilai Konversi IKK	Mutu	Kinerja Unit
1	1,00 – 2,00	20,00 – 40,00	D	Tidak Baik
2	2,01 – 3,00	40,01 – 60,00	C	Kurang Baik
3	3,01 – 4,00	60,01 – 80,00	B	Baik
4	4,01 – 5,00	80,01 – 100,00	A	Sangat Baik

E. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2024

No.	Bulan Register Pemohon Informasi	Jumlah Permohonan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Ligitasi		Status Putusan Komisi Informasi	
			Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Pemohon Informasi
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0

Pada tahun 2024, PPID Universitas Sebelas Maret (UNS) tidak menerima permintaan keberatan informasi maupun penyelesaian sengketa informasi dari pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa layanan informasi publik telah berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan standar keterbukaan informasi, sehingga tidak menimbulkan sengketa. PPID UNS tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan agar akses informasi bagi masyarakat semakin mudah dan akurat.

F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada pelaksanaannya pelayanan informasi publik di lingkungan UNS masih menemui beberapa kendala, yaitu dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaan teknis. Adanya pergantian status UNS dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTNBH serta perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2024 berdampak pada pergantian aturan yang dilaksanakan universitas sehingga perlu dilakukan pembaharuan pada beberapa hal dari status sebelumnya.



**MERDEKA
BELAJAR**

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK UNS 2025

Merespon kendala yang ditemukan selama tahun 2024, maka PPID UNS menindaklanjuti kendala tersebut melalui dua poin:

1. Dengan adanya perubahan SOTK UNS pada tahun 2024, diperlukan perbaikan regulasi induk PPID UNS agar selaras dengan status PTN-BH yang baru. Perbaikan diikuti dengan sosialisasi kepada seluruh unit kerja terkait guna memastikan bahwa implementasi regulasi yang diperbarui dapat berjalan dengan baik dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.
2. Peningkatan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan terkait keterbukaan informasi publik, pelayanan prima, serta pengelolaan teknologi layanan informasi agar petugas PPID mampu memberikan layanan yang lebih profesional, cepat, dan akurat